

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Arbas, Cakra, *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilu Kada di Provinsi Aceh, Cetakan I*, PT. Sofmedia, Medan, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Garafika, Jakarta, 2009.
- Azra, Azyuardi, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta, 2000.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 1999.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi 5*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 2002.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2014.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Marbun, S.F, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- MD, Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Prodjohamidjojo, Mr. Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Syahrani, Riduan, *Kata – Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2009.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tjakranegara, R. Soegijatno, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Utrecht, E. atau Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru Cetakan ke-IX*, Jakarta, 1990.
- Wiyono, R., *“Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang - Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4282).

Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5601)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 3 Seri E) ;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 62).

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dengan Nomor Register Perkara : 17/G/2013/PTUN.YK.

Internet :

Kadar Slamet, *Subjek Hukum (Penggugat dan Tergugat) serta Perkembangan Subjek dan Objek Hukum dalam Yurisprudensi TUN*, PUSDIKLAT Mahkamah Agung RI, Cikopo. Diunduh dari <https://cakimptun4.wordpress.com/artikel/subyek-hukum-penggugat-dan-tergugat/> pada tanggal 23 Januari 2017.

Ujang Abdullah, *Beberapa Aspek Dalam Hukum Materiel dan Hukum Formel Peradilan Tata Usaha Negara*, diunduh dari <http://www.ptun.palembang.go.id/> pada tanggal 03 Februari 2017.

Ade Suerani, *Sejarah Desentralisasi di Indonesia*, diakses dari <http://hukum.kompasiana.com>, diakses tanggal 02 Februari 2017.